

ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BPR PADMA KANTOR PUSAT

Rita Wulandari¹⁾, Kadek Julia Mahadewi²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional

²⁾Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional

writa0210@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

PT. BPR Padma Head Office is a company engaged in financial services, which always strives to provide the best service to its customers by providing various forms of savings, deposits, and credit. Based on the results of research that has been done on the system of providing working capital credit (KMK). The purpose of this report is to find out how the role of BPR Padma Headquarters in distributing Working Capital Credit (KMK) to the wider community, especially business actors, so as to assist business actors in obtaining capital for future businesses. In the KMK granting system, banks require certain rules. These requirements are used to find out more about the data of the prospective debtor and to obtain information about the character of the prospective debtor, the funds currently held, the impact of current economic conditions on the debtor's income, the collateral submitted, as well as measuring the ability of the prospective debtor to repay the credit. To obtain information on prospective debtors, banks are required to conduct credit analysis according to the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic). With the 5C credit analysis, the risk of uncollectibles is lower. Therefore, secure credit is credit that is disbursed using collateral. If the debtor has difficulty in payment, the guarantee will be auctioned off to cover the risk of loss suffered by the bank.

Keywords: Credit, Lending, Working Capital Loans, Collateral Assessment Analysis.

Abstrak

PT. BPR Padma Kantor Pusat sebagai industri yang mempunyai pergerakan dalam sektor jasa finansial. Hal ini berarti selalu berupaya buat menyampaikan layanan paling baik pada nasabah melalui penyediaan beragam jenis wujud tabungan, deposito, serta kredit. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang sistem pemberian kredit modal kerja (KMK). Tujuan laporan ini supaya memahami bagaimanakah peranan BPR Padma Kantor Pusat dalam menyalurkan Kredit Modal Kerja (KMK) pada masyarakat luas khususnya pelaku usaha, sehingga membantu pelaku usaha dalam memperoleh modal untuk usaha kedepannya. Dalam sistem pemberian KMK, bank mensyaratkan sejumlah aturan tertentu. Syarat tersebut digunakan supaya memahami lebih mendalam terkait berbagai data calon debitur serta guna memperoleh informasinya terkait karakter dari calon debitur, pendanaan yang dipunyai sekarang, implikasi keadaan perekonomian sekarang kepada pendapatan debitur, agunan yang dilakukan pengajuan, dan melaksanakan pengukuran keterampilan calon debitur untuk melakukan pengembalian kredit. Untuk mendapatkan informasi calon debitur, maka bank wajib melakukan analisa kredit yang sesuai prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic). Dengan adanya analisa kredit 5C tersebut, maka resiko tak tertagih makin rendah. Oleh sebab itu, kredit yang aman ialah kredit yang disalurkan dengan menggunakan jaminan. Jika debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran, maka jaminan tersebut akan dilelangkan untuk menutupi risiko kerugian yang diderita oleh bank.

Kata kunci: Kredit, Pemberian Kredit, Kredit Modal Kerja, Analisa Penilaian Jaminan.

PENDAHULUAN

Salah satu segi pembangunan di Indonesia yaitu di bidang perekonomian. Dimana peranan lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia untuk menyediakan pendanaan di aktivitas usaha. Kelembagaan finansial berarti industri yang mempunyai pergerakan dalam sektor finansial yang dimana kegiatannya diselenggarakan dalam sektor finansial. Biasanya kelembagaan finansial diklasifikasikan jadi dua yakni Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Menurut Sondakh, Ilat, & Budiarmo (2018) Bank mempunyai peranan agar memberi bantuan pendanaan atau kredit terhadap warga yang memerlukan. Dalam memberi kredit yang mempunyai berbagai keuntungan baik bagi pemerintahan, perbankan melainkan juga untuk nasabahnya. Kredit yang ingin diberi dari kelembagaan finansial kepada debitur, yang mana kelembagaan finansial baru bisa memberi peminjaman bila kelembagaan finansial sudah yakin bahwasanya debitur bisa melakukan pengembalian peminjaman yang diterima tepat dengan tenggat waktunya beserta persyaratan yang sudah disetujui.

Menurut Suharno (2003) “Kredit merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu di mana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan ganti rugi atas dana yang dipinjamnya.”

Suatu aktivitas usaha bank yakni mencakup memberi kredit. Bank pemberi kredit hendaknya sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan Pasal 1131 KUH Perdata yang memberi pengaturan terkait kedudukan aset individu yang berutang dalam

menjaminan utangnya itu guna mengamankan kepentingan selaku pihak yang mempunyai piutang. Kepada tiap objek penjaminan kredit yang diajukannya oleh calon debitur dilaksanakan evaluasi oleh perbankan yang mendapatkannya. Berdasarkan Bahsan, M. (2010) “Bank terlebih dahulu telah melakukan penelitian untuk memastikan sejauh mana objek jaminan kredit yang diajukan pemohon kredit. Jaminan yang dapat dipertimbangkannya sesuai dengan kebijakan bank. Dalam hal ini, bank perlu memperoleh dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan kredit dan melakukan pula peninjauan atau melihat fisiknya.”

Pemberian kredit oleh bank memiliki resiko kemungkinan tak tertagih. Analisis kredit yang perlu dilihat dalam penyerahan pinjaman kredit guna modal kerja bagi calon debitur. Guna meminimalisir sesuatu itu baik mengaplikasikan prinsip 5C untuk memberi kredit yakni (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*). Hal berikut dilaksanakan guna mengevaluasi kelayakannya untuk menerima kredit. Melalui lima prinsip tersebut, *Collateral* (jaminan) yakni sesuatu yang terpenting untuk menetapkan dalam memberi kredit. Melalui terdapatnya penjaminan sehingga risiko kredit macet bisa jadi lebih minim. Ada pula akan menyeleksi tiap terdapat pengajuan kredit yang masuk. Hal itu dilaksanakan agar risiko tidak tertagih piutangnya dapat ditekankan jadi lebih minim.

Modal kerja merupakan hal utama yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, karena tanpa modal kerja yang cukup dan memadai akan sangat mempengaruhi produksi usaha yang dijalankan dan akan memperlambat perkembangan perusahaan itu sendiri. Modal kerja

dibutuhkan untuk melancarkan dan menjaga keberlangsungan kehidupan industri, sehingga pelaku bisnis ada tuntutan agar mempergunakan fasilitas kredit modal kerjanya yang disediakan pihak perbankan. Misalnya yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berdasarkan jenis kebutuhan dan kepentingan dalam bisnis menyebabkan permintaan dan kebutuhan dana juga beragam dan skema kredit yang dipakai. Menurut Lutfie, H., & Priansa, D.J. (2019) “Berdasarkan penggunaannya, salah satunya ada Kredit Modal Kerja (KMK) ialah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur. Pada umumnya, debitur menggunakan uang hasil pinjaman kepada bank untuk pembelian bahan baku produksi dalam jangka waktu tertentu.”

PT. BPR Padma Kantor Pusat ialah salah satu dari sekian banyak BPR yang ikut serta untuk menaikan taraf kehidupan warganya. Selaku industri yang mempunyai usaha dalam sektor jasa finansial, PT. BPR Padma Kantor Pusat senantiasa berusaha guna memberi layanan paling baik kepada para nasabah melalui penyediaan bermacam bentuk tabungan, kreditu, deposito. Penyaluran kredit dari PT BPR Padma Kantor Pusat mencakup Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Konsumtif (KON), Kredit Investasi (KIN). Adanya kehadiran PT. BPR Padma Kantor Pusat dirasakan begitu memberi bantuan para pelaku usaha yang memerlukan Kredit Modal Kerja (KMK) selaku pengembangan usaha. Menurut Farisi & Saifi (2016) Sistem dalam memberi kredit mencakup tahapan permohonan kredit, mewawancarai, mensurvei, menganalisis kredit, memutuskan kredit, mencairkan kredit, serta administrasi kredit.

METODE

Jenis data yang dipakai data kualitatif serta kuantitatif. Data kualitatif yakni mencakup mewawancarai pada *Customer Service* mengenai garis besar pemberian kredit, serta Kabid. Bisnis mengenai cara penilaian jaminan kredit. Sedangkan, Data kuantitatif yaitu berupa data analisa kredit prinsip 5C pada PT. BPR Padma Kantor Pusat. Dimana sistem pemberian KMK dan penilaian jaminan akan dibahas secara terperinci untuk mengatasi terjadinya penunggakan atau gagal bayar debitur.

Pemakaian sumber datanya yaitu primer serta sekunder. Data primer berarti data yang asalnya dari narasumber, berupa wawancara. Sedangkan, data sekunder yaitu membaca dari pustaka dan jurnal ilmiah.

Metode menghimpun data yang dipakai yakni berupa wawancara dan dokumentasi.

Ruang lingkup pembahasan yang hanya membahas mengenai bagaimana peranan BPR Padma Kantor Pusat dalam menyalurkan Kredit Modal Kerja (KMK) pada masyarakat luas khususnya pelaku usaha, sehingga membantu pelaku usaha dalam memperoleh modal untuk usaha kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan yang dibutuhkan dalam Pemberian Kredit Modal Kerja

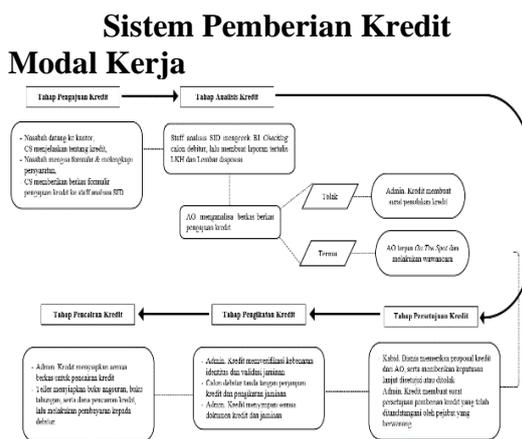
Tabel 1. Persyaratan Pemberian KMK

Persyaratan	Individu	Perusahaan
Aplikasi Permohonan Kredit diisi lengkap	Ya	Ya
Fotocopy Kartu Identitas Calon Debitur	Ya	

Fotocopy Kartu Identitas Penjamin	Ya	Ya
Fotocopy Kartu Keluarga	Ya	
Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		Ya
Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		Ya
Fotocopy Akta Pernikahan / Cerai	Ya	
Slip Gaji	Ya	
Laporan Keuangan		Ya
Fotocopy Dokumen Jaminan	Ya	Ya

formulir permohonan kredit serta kelengkapan persyaratannya kepada *Customer Service*.

c) *Customer Service* menerima formulir permohonan kredit melalui calon debiturnya, lalu CS melaksanakan pengecekan lagi kelengkapannya berkas yang diberi dari calon debitur serta mencatatkan permohonan itu dalam buku register permohonan kredit selaras dengan tanggal diterima serta memberi nomor pendaftarannya dalam formulir permohonan kredit itu .



Gambar 1. Alur Pemberian Kredit



Gambar 2. Pembuatan Register Kredit

- Tahap Pengajuan Kredit
 - a) Calon debitur datang ke Kantor menemui *Customer Service*. *Customer Service* menjelaskan mekanisme permohonan kredit dan mempersiapkan formulir terkait agar diberi jawaban atau diisikan datanya oleh calon debitur.
 - b) Calon debitur mengisi formulir permohonan beserta memberi kelengkapan syarat-syarat dokumen, kemudian melakukan penyerahan

- Tahap Analisis Kredit
 - a) Staf Analisis SID (Sistem Informasi Debitur) menerima formulir permohonan kredit dari *Customer Service*, kemudian SID akan melakukan BI *Checking*, menciptakan pelaporan tertulis LKH (Lembar Kondisi Hutang) dan lembaran disposisi mengenai keadaan utang calon debiturnya pada

perbankan manapun sebagai persyaratan untuk tahap keputusan kredit berikutnya. Kemudian melaksanakan penyerahan pelaporan keadaan utang calon debiturnya terhadap *Account Officer* yang merupakan informasi awalan untuk mengusulkan kredit calon debiturnya itu.

- b) *Account Officer* melaksanakan analisis awalan permohonan yakni kelengkapan syarat-syarat, melakukan analisis keterampilan pengembalian dari data yang diberi calon debiturnya. Jika hasil menganalisis menandakan tidak ada kelayakan, sehingga *Account Officer* selanjutnya keputusannya itu terhadap bagian Administrasi agar dilakukan pembuatan surat pemberitahuan penolakan kredit. Jika hasil menganalisis awalan menandakan ada kelayakan, berarti *Account Officer* bisa melaksanakan *on the spot* dalam tempat usaha serta wawancara kepada calon debitur. Menurut (Priyacitta & Utami, 2022) *Account Officer* melakukan analisa kredit yang berdasarkan pada prinsip 5C, sebagai berikut :

i. Character

Suatu keyakinan bank terhadap sifat, watak, kebiasaan debitur yang memberi pengaruhnya

kepada proses memberi kredit. Hal tersebut dapat diteliti dari latar belakang keluarga, pekerjaan, gaya hidup, dan informasi dari lingkungan usahanya.

ii. Capacity

Kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman yang dinilai dari total penghasilan, pengeluaran rumah tangga, dan jumlah saldo tabungan calon debitur dan avalist.

iii. Capital

Penggunaan modal yang dimiliki untuk usaha yang dijalankan. Hal tersebut dapat dinilai dari banyaknya modal yang dilakukan penanaman, debitur dievaluasi makin terfokuskan untuk melaksanakan usaha. Bagi karyawan atau masyarakat yang tidak menjalankan sebuah usaha, aspek *capital* dinilai dari gaji atau pendapatan debitur dan avalist tiap bulan.

iv. Collateral

Jaminan yang diberikan debitur kepada bank yang digunakan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian bank, jika debitur tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

v. Condition of Economic

Penilaian terhadap kondisi ekonomi atau pekerjaan debitur



Gambar 4. Mencatat Angsuran Kredit

Penilaian Barang Jaminan di PT. BPR Padma Kantor Pusat

Untuk melakukan penilaian jaminan, maka ada hal yang wajib diperhatikan supaya evaluasi penjaminan yang dilaksanakan menciptakan suatu hal yang maksimal yakni:

- a. Memakai nilai taksasi.
- b. Besaran nilainya taksasi ditetapkan maksimalnya 80% dari nilai *market* bagi kendaraan baru serta 60% dari nilai *market* bagi kendaraan bekas. Sedangkan 70% dari nilai *market* bagi bangunan serta 60% dari nilai *marketi* bagi tanah kosong.
- c. Nilai pasar didapatkan melalui informasi makelar, internet, broker, serta perbankan lainnya.

Penilaian Barang Jaminan Berdasarkan Permohonan Kredit Modal Kerja PT. BPR Padma Kantor Pusat

Calon Debitur A

- 1) Jenis kredit : Kredit Modal Kerja
- 2) Plafon : Rp7.000.000,-
- 3) Jangka waktu : 24 Bulan (2 Tahun)

- 4) Nilai jaminan : Rp13.000.000,-
- 5) Jenis Jaminan : Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)
- 6) Metode penilaian : Nilai Taksasi

Nilai Pasar : Rp13.000.000,-

Nilai taksasi yang jadi acuan BPR Padma Kantor Pusat yakni sejumlah 60% dari Nilai Pasar.

Persen nilai kendaraan = 60%

Nilai Taksasi :

$Rp13.000.000,- \times 60\% = Rp7.800.000,-$

Total nilai plafon maksimal = Nilai Taksasi

- Cara mengevaluasi penjaminan kendaraan roda dua :

- a) Menerima berkas pokok calon debitur terkait penjaminan itu.
- b) Melaksanakan pengecekan keadaan kendaraan calon debitur serta menyelaraskan terhadap berkasnya.
- c) Mencarika harga pasaran dalam internet, makelar, perbankan, broker.
- d) Melaksanakan penyusunan pelaporan hasil evaluasi.
- e) Menetapkan nilai taksasinya yang dilandaskan pada hasil survey dari harga pasar.

- Hasil analisa kredit 5C berdasarkan pengamatan *Account Officer* (AO) untuk calon debitur A dapat dijabarkan sebagai berikut :

i. *Character*

Calon debitur sangat terbuka dan kooperatif dalam memberikan

keterangan yang diminta dan data yang kami perlukan serta memang dikenal memiliki hubungan keluarga dan sosial yang baik dengan warga sekitar, serta termasuk pekerja yang ulet bekerja dan jujur.

ii. Capacity

Dilihat dari usaha calon debitur yang sudah lama dijalani dan sudah mempunyai pelanggan tetap serta pendapatan calon debitur setiap bulannya rata-rata Rp100.000,- x 30 hari sehingga menjadi Rp3.000.000 per bulannya. Dan pendapatan avalist sebagai tukang parkir setiap bulannya rata-rata Rp50.000,- x 30 hari yaitu Rp1.500.000,- perbulannya. Setelah pendapatan calon debitur dan avalist dikurangi biaya-biaya rumah tangga dan biaya tidak terduga masih tersisa sebesar Rp800.000,- per bulan, sehingga masih terlihat kemampuan untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran kredit setiap bulannya kepada BPR Padma.

CASH FLOW						
(PENERIMAAN)						
NO	URAIAN	Pebruari	Maret	April	TOTAL	RATA-RATA
1	Calon debitur	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00
2	Avalist	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00
(PENGELUARAN)						
NO	URAIAN	Pebruari	Maret	April	TOTAL	RATA-RATA
1	Rumah tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
2	Temaga kerja	-	-	-	-	-
3	Listrik	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00
4	Telepon	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00
5	PDAM	200.000,00	200.000,00	100.000,00	500.000,00	166.666,67
6	Biaya Kost	-	-	-	-	-
7	Pendidikan	-	-	-	-	-
8	Transportasi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00
9	Sosial	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
10	Angsuran bank lain	1.083.333,00	1.083.333,00	1.083.333,00	3.249.999,00	1.083.333,00
11	Lain-lain	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
	TOTAL	3.583.333,00	3.583.333,00	3.483.333,00	10.649.999,00	3.549.999,67
TOTAL PENGHASILAN BERSIH					RP.	950.000,33
CF 15%					RP.	142.500,28
REPAYMENT CAPACITY					RP.	807.500,28
MAKSIMAL KREDIT BERDASAR KEMAMPUAN BAYAR					RP.	15.000.000,00

Gambar 5. Cash Flow Calon Debitur

REKAP IDEB					
NO	BANK	PLAFON	ANGSURAN(BULAN)	SALDO	KOL
1	PT Bank Rakyat Indonesia	50.000.000,00	1.083.333,00	47.899.132,00	1
	TOTAL	50.000.000,00	1.083.333,00	47.899.132,00	
SALDO TABUNGAN					
NO	NAMA BANK	Pebruari	Maret	April	Rata-rata
1	Bank Padma 0012069031	2.429.792	2.435.088	2.841.292,24	2.568,724
2	Bank Padma 0012069201	3.019.413	3.023.881	3.329.017,71	3.124,104
	TOTAL	5.449.205	5.458.969	6.170.309,95	5.692,828

Gambar 6. Rekap IDEP & Saldo Tabungan Calon Debitur

iii. Capital

Calon debitur saat ini menjalankan usaha sebagai pedagang nasi campur dengan tempat usaha yang strategis yang sudah dijalankan kurang lebih 5 tahun dan sudah memiliki pelanggan tetap. Avalist yang merupakan suami calon debitur bekerja sebagai tukang parkir di pasar. Asset yang sudah dimiliki saat ini oleh calon debitur berupa kendaraan bermotor. Saat ini calon debitur masih kekurangan dana untuk menambahkan stok barang dagangan sehingga calon debitur mengajukan kredit di BPR Padma sebesar Rp7.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan dan bunga 18% per tahun menurun.



Gambar 7.1. Tampak Depan Usaha Warung Makan



Gambar 7.2. Tampak Samping Usaha Warung Makan

iv. Collateral

Jaminan yang diserahkan berupa 1 (satu) kendaraan roda dua merk Honda Scoopy 108 CC tahun 2016, dengan kondisi yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dengan Nilai Taksasi sebesar Rp13.000.000,- dengan koefisien 60%, maka maksimal kredit yang diberikan sebesar Rp7.800.000,-



Gambar 8.1. Tampak Depan Jaminan



Gambar 8.2. Tampak Samping Jaminan

v. Condition of Economic

Dilihat dari usaha yang dijalani calon debitur dari sisi letak cukup strategis untuk membeli makanan dan minuman. Dan dibantu oleh pendapatan avalist sehingga setelah dikurangi biaya-biaya rumah tangga masih terlihat adanya kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya.

ANALISA SWOT

- Strength

Calon debitur memiliki semangat dan keyakinan yang sangat besar dalam menjalankan usahanya dibantu juga oleh avalist. Jaminan yang diagunkan juga tergolong merketable.

- Weakness

Saat ini calon debitur masih kekurangan dana untuk menambah modal usaha yang dikelola, sehingga mengajukan kredit di BPR Padma.

- Opportunity

Dengan tambahan dana kredit calon debitur dapat menambah stok barang dagangan, sehingga bisa meningkatkan pendapatan setiap bulannya.

- Threats

Adanya persaingan di dalam jenis usaha yang sama bisa membuat pendapatan debitur terancam, sehingga harus bisa menambah jumlah stok barang dagangan agar lebih variasi.

Dari kesimpulan diatas BPR Padma kantor Pusat menerima kredit yang diajukan calon debitur A. Maksimal pemberian kredit 60% dari jaminan yang diberikan :

$$60\% \times \text{Rp}13.000.000,- = \text{Rp}7.800.000,-$$

Solusi permasalahan dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu agar tidak terjadi penunggakan kredit, maka setiap *Account Officer* harus mengawasi debitur masing masing. Menurut (Dini & Ratna, 2019) “Debitur dengan kategori kredit dalam perhatian khusus, dilakukan dengan pendekatan kepada debitur melalui telepon atau AO kredit sendiri datang ke lapangan/rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif. Apabila debitur tidak menanggapinya, maka bank akan melakukan penarikan agunan/jaminan dan akan dilelang sebagian atau seluruh agunan yang diajukan debitur pada saat pengajuan kredit” Dengan adanya pengawasan oleh AO, maka tingkat penunggakan kredit rendah. Sehubungan dengan hal ini, maka pihak bank wajib segera menangani penunggakan kredit dengan cara melalui panduan serta mekanisme tertulis yang ditetapkan oleh peraturan internya. Apabila debitur benar-benar mengalami kesulitan dalam pembayaran, maka jaminan tersebut dapat dilelangkan untuk menutupi pelunasan utang debitur kepada bank. Jika masih ada sisa dari pelunasan utang, bank akan mengembalikan kelebihan sisa tersebut kepada debitur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan terhadap sistem dalam memberi kredit modal kerja bagi PT. BPR Padma Kantor Pusat, sehingga berkesimpulan yakni sistem pemberian kredit modal kerja sudah berlangsung

secara baik serta sejalan terhadap teori mekanisme dalam memberi kredit biasanya yang diaplikasikan dalam perbankan. Melalui mekanisme dalam memberi kredit modal kerja yang baik serta benar, sehingga terdapat upaya pihak perbankan agar melaksanakan antisipasi adanya tunggakan kredit. Adapun BPR Padma Kantor Pusat selalu berusaha yang terbaik untuk tetap menjaga serta memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada para nasabah yang ingin melakukan peminjaman kredit. Selama melaksanakan kegiatan PKL, yang dimana pemberian kredit harus didasari oleh prinsip 5C agar memberikan timbal balik antara nasabah dan perusahaan serta tidak merugikan pihak bank itu sendiri. Tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan kredit tersebut. Jika tidak sesuai dengan persyaratan yang tertera, maka bank tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk pemberian kredit.

Saran

Mengamati kesimpulannya tersebut, sehingga pengajuan saran untuk bahan mempertimbangkan saat menentukan keputusan kepada pihak PT. BPR Padma Kantor Pusat dalam hal sistem pemberian kredit modal kerja di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, bank wajib terus meningkatkan ketelitian dalam melakukan analisa kredit prinsip 5C supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan bantuan kepada nasabah yang memiliki catatan pembayaran atau pelunasan yang kurang bagus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pendidikan Nasional dan Dosen Pembimbing telah mendukung

terselenggaranya kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini. Kepada pimpinan beserta karyawan kantor yang telah membantu dan mendukung dalam mengerjakan laporan ini dan memberi dukungan penuh sehingga terselesaikan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahsan, M. (2010). *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (h.70)
- Lutfie, H., & Priansa, D. J. (2019). *Manajemen Bisnis Perbankan Kontemporer*. CV PUSTAKA SETIA, Bandung. (h.126)
- Suharno. (2003). *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan. (h.1)

Jurnal

- Farisi, K., & Saifi, M. (2017). DALAM RANGKA Mendukung Pengendalian Kredit Bank Pada PT . KBPR Pancadana Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 30(1), 117–124.
- Husaini, A., Administrasi, F. I., & Malang, U. B. (2015). *DALAM UPAYA MENGATASI KREDIT BERMASALAH (Studi pada PD BPR Tugu Artha Malang Periode Tahun 2009-2011)*. 22(2), 1–7.
- Priyacitta, N. luh P. Y., & Utami, P. D. Y. (2022). *Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Padma Denpasar*. 10(4), 973–983.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/79435/44032/>
- Pt, D. I., Perkreditan, B., & Bpr, R.

(n.d.). *UPAYA PENANGANAN KREDIT MODAL KERJA Dini Sulastris Idris , Ratna Widayati*. 10, 1–8.

- Sondakh, M., Ilat, V., & Budiarto, N. S. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal (Spi) Terhadap Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Pembantu Sam Ratulangi. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 610–617.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21553.2018>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.